

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi Kerjasama Islam atau yang di singkat OKI merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Didirikannya OKI dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 yang menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds, tercetuslah suatu pemikiran untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam.

Latar belakang didirikannya OKI, antarlain pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu tahun 1964, timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional dan pada tahun 1965, diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme. Pada tahun 1967, pecah Perang Timur Tengah melawan Israel sehingga solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat. Pada tahun 1968, Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional. Pada tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Agsha dan peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.

Berdasarkan uraian diatas, tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membahas tentang pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari Israel. Berdasarkan KTT inilah OKI berdiri, yang di prakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, serta beberapa negara seperti Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko sebagai Panitia Persiapan.

Saat ini OKI beranggotakan 57 negara dan 37 peninjau, yang terdiri dari komunitas Muslim dan Organisasi Internasional. Anggota-anggota OKI terdiri dari Negara-negara berdaulat yang terdiri dari para pemuka Islam (seperti halnya dengan Rabitah Alam Islami). Tujuan pendirian OKI secara garis besar adalah memajukan perdamaian dan keamanan di dunia Muslim. Sekeretariat OKI berada di Jeddah, Saudi Arabia sedangkan Sekjennya saat ini, yang terpilih sejak 31 Januari 2014 adalah Iyad bin Amin Madani dari Makkah, Saudi Arabia. Sekjen sebelumnya adalah Ekmeleddin Ihsanoglu yang berasal dari Turki. Sekjen OKI adalah jabatan struktural tertinggi dalam OKI yang dipilih setiap 5 tahun sekali.<sup>1</sup>

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu : Pertama, memperkuat/memperkokoh, antara lain : solidaritas diantara negara anggota; kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek; serta perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. Kedua, melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya. Ketiga, bekerjasama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan; menciptakan

---

<sup>1</sup><http://oichumanrights.wordpress.com/tag/organisasi.kerjasama-islam/> diakses pada 20 September 2014

suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.<sup>2</sup>

Adapun kekuatan yang dimiliki OKI antara lain: Pertama, total cadangan sumber daya alam negara-negara anggota OKI terus meningkat dalam dekade terakhir. Total cadangan tersebut mencapai 13,7 % dan 29,6 %, masing-masing untuk tahun 2000 dan 2010. Pangsa cadangan (termasuk emas) dari negara-negara OKI dalam total dunia meningkat dari 9,8 % menjadi 13,5 % antara tahun 2000 dan 2010. Peningkatan cadangan menyiratkan bahwa negara-negara OKI menjadi lebih stabil dan memiliki posisi yang cukup baik terhadap guncangan eksternal. Kedua, negara-negara anggota OKI memiliki cadangan minyak mentah terbesar. Pada tahun 2010, 21 negara OKI memiliki 960.000.000.000 barel cadangan minyak, yaitu 65 % dari total cadangan global. 5 negara OKI memiliki hampir lebih dari setengah dari cadangan minyak mentah global. Ketiga, negara-negara anggota OKI, dari 21 negara OKI memiliki total cadangan gas alam dari 111.496 billion m<sup>3</sup> yaitu 58 % dari cadangan gas alam global pada tahun 2010. Diantara negara-negara OKI, Iran memimpin dengan 17% , diikuti oleh Qatar 13 % , Turkmenistan dan Arab Saudi dengan 4 %. Keempat, OKI memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Sebagai sebuah organisasi Internasional, OKI mempunyai jumlah negara yang tidak bisa dibilang sedikit. Uni Eropa yang mempunyai jumlah anggota hanya 28 negara saja bisa menjadi sebuah organisasi maju yang bisa saling menopang dan menyokong antar anggotanya.<sup>3</sup> Dengan 57 negara anggota, OKI bisa membentuk suatu kekuatan yang mempunyai *bargaining position* di mata dunia internasional. Keempat hal ini lah yang membuat OKI memiliki cukup pengaruh dalam dunia internasional.

---

<sup>2</sup>ditjenkpi.kemendag.go.id/website.../OKI\_-\_buku20060109121722.doc diakses pada 11 September 2011

<sup>3</sup><http://www.sesrtcic.org/files/article/453.pdf> diakses pada 20 September 2014

Di Myanmar, pemerintahan Muslim berlangsung beberapa abad di daerah Arakan yang kemudian meluas ke selatan sejauh Moulmein selama pemerintahan Sultan Salim Shah Razagri (1593-1612 M). Jika dibandingkan dengan Filipina dan Thailand, jumlah Muslim di Myanmar lebih besar jumlahnya sekitar 7 juta hingga 10 juta jiwa. Setengah dari jumlah tersebut tinggal di Arakan, suatu provinsi di barat laut Myanmar. Semula Arakan bernama Rohang, dan masyarakatnya disebut Rohingya. Pada tahun 1430 Rohingya menjadi kesultanan Islam yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Syah dengan bantuan masyarakat Muslim di Bengal (sekarang Bangladesh). Bahasa Persia merupakan bahasa Negara di Arakan dengan ibukota di Myohaung.<sup>4</sup>

Kronologis 'peniadaan' etnis Muslim Rohingya yang dilakukan oleh kelompok Budhis yang anarkis di Myanmar. Bermula pada 1784 M, kerajaan Budha berkoalisi menyerang dan berusaha menduduki wilayah Arakan. Mereka melakukan kerusakan di wilayah tersebut. Mereka membunuh kaum Muslimin, membunuh para ulama kaum Muslimin dan para dai. Mereka juga merampok kekayaan kaum Muslimin, menghancurkan bangunan-bangunan Islami baik berupa mesjid maupun sekolah. Hal itu karena kedengkian mereka dan fanatisme mereka terhadap budhisme. Pada 1824 M, Inggris menduduki dan melakukan penjajahan di Burma termasuk wilayah Arakan. Pada tahun 1937, kolonial Inggris menduduki provinsi Arakan dengan kekerasan dan menggabungkannya ke Burma (yang saat itu merupakan koloni Inggris yang terpisah dari pemerintah Inggris di India). Untuk menundukkan kaum Muslim agar bisa dikuasai dan dijajah, Inggris memersenjatai umat Budha.

Tahun 1942 lebih dari 100 ribu Muslim dibantai oleh orang-orang Budha dan ratusan ribu mengungsi di luar negeri. Pada 1947 M Inggris menggelar konferensi untuk mempersiapkan

---

<sup>4</sup>Kettani, Ali M.2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.hal 149-150

kemerdekaan dan mengajak seluruh kelompok dan ras di negeri tersebut kecuali Muslim Rohingya. Pada konferensi itu Inggris menetapkan menjanjikan kemerdekaan kepada tiap kelompok atau suku sepuluh tahun kemudian. Namun pemerintahan Burma tidak mengimplementasikan hal itu. Yang terjadi adalah penindasan terhadap kaum Muslim terus berlanjut. Kemudian tahun 1948 M, Inggris memberi Burma kemerdekaan formalistik dan wilayah Arakan dimasukkan kedalam wilayah kemerdekaan Burma.

Tahun 1962 terjadi kudeta militer di Burma dibawah pimpinan militer Jendral Ne Win. Rezim militer melanjutkan 'tugas penting' yakni pembantaian terhadap umat Islam. Lebih dari 300 ribu Muslim diusir ke Bangladesh. Tahun 1978, rezim militer mengusir lagi setelah jutaan Muslim ke luar Birma. Menurut UNHCR, lebih dari 40 ribu orang Muslim terdiri atas orang-orang tua, wanita dan anak-anak meninggal dunia saat pengusiran akibat kondisi mereka yang memprihatinkan. Di tahun 1982 operasi penghapusan kebangsaan kaum Muslim karena dinilai sebagai warga negara yang bukan asli Burma. 1988M lebih dari 150 ribu kaum Muslimin terpaksa mengungsi ke luar negeri. Pemerintah Myanmar menghalangi anak-anak kaum Muslimin mendapatkan pendidikan. Tidak hanya itu untuk mengurangi populasi, kaum Muslim dilarang menikah sebelum usia 30 tahun. Tahun 1991, lebih dari setengah juta kaum Muslim mengungsi akibat penindasan yang mereka alami.

Pada bulan Juni 2012 orang-orang Budha melakukan serangan terhadap sebuah bus yang mengangkut Muslim dan membunuh sembilan orang dari mereka. Konflik cenderung dibiarkan oleh pemerintah. Pembunuhan, pembakaran rumah, dan pengusiran terjadi. Puluhan ribu kaum Muslimin keluar dari rumah mereka. Bangladesh pun menolak membantu kaum Muslim yang tiba di Bangladesh. Negara ini bahkan mengembalikan dan menutup perbatasan untuk saudara Muslimnya. Tidak ada angka pasti jumlah korban Muslim, namun di duga puluhan ribu Muslim

terbunuh pasca pecahnya kembali konflik pada awal Juni 2012.<sup>5</sup> Pada Juli 2012 diberitakan sudah 6000 jiwa Muslim Rohingya yang tewas akibat kerusuhan antar etnis di Myanmar tersebut. Muslim Rohingya menjadi korban penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran dan penjarahan oleh buddhis ekstrim dan tentara pemerintah. Saat ini sebagian Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan India yang dibantu oleh LSM Muslim Inggris yang menyediakan pengobatan dan bantuan makanan disana. Sebagian juga diberitakan diperbatasan Bangladesh ada sekelompok warga Buddha Bangladesh yang mengusir mereka kembali ke Myanmar.<sup>6</sup>

OKI sebagai suatu lembaga organisasi Internasional yang dalam tujuannya mencantumkan tentang kesiapannya untuk memperkuat perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya serta bekerjasama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan. Dalam hal ini OKI memiliki peran ikut melindungi dan membantu serta menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak umat Muslim di Myanmar, adapun yang akan diperjuangkan oleh OKI adalah mengenai HAM dan hak kewarganegaraan. Meskipun Myanmar bukan anggota OKI, namun sebagai pelidung hak umat Muslim, OKI tentunya memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya yang sesuai dengan tujuannya.

Seperti yang di ketahui diatas bahwa OKI sesungguhnya memiliki kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar, OKI yang memiliki anggota 57 negara yang mayoritas memiliki agama Islam tentu bisa digerakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan disana. OKI menjadi salah satu harapan umat Muslim di Myanmar namun belum

---

<sup>5</sup><http://mirajnews.com/id/internasional/asia/ketua-oki-kutuk-kekerasan-terhadap-muslim-di-myanmar/> diakses pada 11 September 2014

<sup>6</sup><http://regional.kompasiana.com/2012/07/15/benarkah-presiden-myanmar-thein-sein-perintahkan-usir-muslim-rohingya-471518.html> diakses pada 12 September 2014

bisa membantu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab OKI sebagai organisasi Internasional. OKI belum mampu merealisasikan apa yang menjadi tujuannya selama ini. Permasalahan di Myanmar bukanlah hal baru, namun tidak banyak tindakan dan usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak OKI meskipun OKI merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB karena memiliki cukup banyak anggota. OKI memiliki potensi besar dalam menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Pada kasus Myanmar, OKI memang tidak hanya berpangku tangan, adapun salah satu bentuk kepedulian yang OKI lakukan adalah membawa kasus pelanggaran HAM di Myanmar kepada PBB, namun laporan tersebut hanya menuai peringatan dari PBB untuk pemerintahan Myanmar dan tidak ada tindakan tegas untuk segera menyelesaikannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemaparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada di Myanmar, karena sebagai seorang Muslim pun merasa turut prihatin terhadap keadaan umat Muslim di Myanmar yang tengah menghadapi cobaan yang berat. Dan penulis pun tertarik untuk mengetahui penyebab dan alasan mengapa OKI tidak kunjung menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak umat Muslim di Myanmar.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu mengapa OKI kurang efektifkinerjanya dalam memperjuangkan hak-hak umat Muslim di Myanmar.

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep Fungsi Organisasi Internasional

Dalam mengaitkan antara OKI dengan fungsi organisasi internasional perlu diketahui beberapa definisi mengenai organisasi internasional. Menurut Bowett D.W. dalam bukunya “Hukum Organisasi Internasional”, Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa secara umum tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima. Organisasi ini pada umumnya merupakan organisasi yang secara permanen dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral yang disertai tujuan yang sesuai dengan kriteria tertentu.<sup>7</sup>

Definisi organisasi Internasional menurut pendapat Sumaryo Suryokusumo, merupakan suatu proses, dan pada waktu tertentu organisasi internasional menyangkut aspek-aspek yang merupakan perwakilan dari tingkat proses tertentu yang telah dicapai. Dalam rangka kerja sama, organisasi internasional juga diperlukan untuk menyesuaikan dan mencari kompromi dalam menciptakan kesejahteraan serta penyelesaian persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.<sup>8</sup> Organisasi Internasional menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. adalah suatu bentuk kerjasama internasional yang memberikan wadah negara-negara untuk berlembaga, pada umumnya didirikan berlandaskan suatu persetujuan dasar yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff secara berkala untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik.<sup>9</sup>

Tujuan Organisasi Internasional menurut Werner J. Feld dan Robert S. Jordan, tujuan organisasi terbagi menjadi tiga, antara lain: Pertama, untuk memelihara kepentingan dari

---

<sup>7</sup>[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi\(p-\).pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi(p-).pdf) diakses pada 3 November 2014

<sup>8</sup>Priska Oktavia Samosir, Sejarah Perkembangan, Sibjek, Sumber dan Teori Hukum Internasional tercantum pada [https://www.academia.edu/8271248/SEJARAH\\_PERKEMBANGAN\\_SUBJEK\\_SUMBER\\_DAN\\_TEORI\\_HUKU\\_M\\_INTERNASIONAL](https://www.academia.edu/8271248/SEJARAH_PERKEMBANGAN_SUBJEK_SUMBER_DAN_TEORI_HUKU_M_INTERNASIONAL) diakses pada 3 November 2014

<sup>9</sup>[https://www.academia.edu/5845406/Pengertian\\_Hubungan\\_Internasional\\_dan\\_Organisasi\\_internasional\\_menurut\\_para\\_ahli](https://www.academia.edu/5845406/Pengertian_Hubungan_Internasional_dan_Organisasi_internasional_menurut_para_ahli) diakses pada 13 September 2014

anggota-anggotanya di kancah Internasional (global dan internasional). Kedua, untuk mengimbangi kekuatan dari organisasi internasional lainnya. Ketiga, untuk merubah, memodifikasi serta menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya.<sup>10</sup>

Fungsi Organisasi Internasional menurut Karen Mingst, ada tiga fungsi organisasi internasional menurut tingkat analisisnya. Pertama, ditingkat Sistem Internasional yaitu organisasi internasional dalam menangani suatu masalah internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi bersama dengan negara-negara di dunia. Organisasi internasional juga berfungsi untuk mengumpulkan segala informasi yang terjadi di dunia selain itu juga berfungsi untuk mensurvei. Organisasi juga memiliki otoritas dalam membuat suatu ketetapan internasional dalam membantu penyelesaian berbagai konflik serta perselisihan yang terjadi di dunia. Kedua, fungsi organisasi internasional terhadap negara, yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara sebagai instrumen politik luar negeri. Selain mencari informasi dunia, organisasi internasional juga berfungsi memberikan informasi suatu negara di dunia internasional. Selain itu organisasi internasional juga berfungsi sebagai penentu perilaku suatu negara yakni organisasi internasional dapat menghukum negara-negara apabila memiliki suatu kebijakan yang tidak sesuai dan dapat mencegah negara dalam pengambilan suatu kebijakan. Ketiga, fungsi organisasi internasional, hubungan terhadap individu yaitu organisasi internasional dapat menjadi suatu wadah dimana individu dapat mengenal dan bersosialisasi terhadap norma-norma internasional. Selain itu organisasi internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu negara di dunia.<sup>11</sup>

Berdasarkan fungsi organisasi internasional yang disampaikan oleh Karen Mingst, pada point yang pertama tentang fungsi organisasi internasional di tingkat Sistem Internasional, bahwa

---

<sup>10</sup>Rudy, T.May. 2009 *Administrasi dan Organisasi Internasiona*. Bandung: Refika Aditama hal 30-31

<sup>11</sup>Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, W. W. Norton, 1999, hal.241-242.pdf

organisasi internasional dapat berkontribusi pada negara-negara di dunia dalam menyelesaikan konflik-konflik mengenai permasalahan internasional. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa OKI sebagai organisasi internasional memiliki kekuatan dan pengaruh untuk menyelesaikan konflik di Myanmar karena, konflik yang terjadi disana sudah merambat kepada permasalahan pelanggaran HAM dan genosida, tidak hanya diskriminasi terhadap masyarakat minoritas Muslim saja. Pelanggaran HAM dan genosida merupakan permasalahan yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi warga internasional.

## **2. Teori Efektivitas Rezim**

Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas merupakan suatu penilaian terhadap seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana dalam menghasilkan sesuatu, seseorang dapat mengerjakannya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa dapat dikatakan efektif, ketika seseorang dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya.<sup>12</sup> Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless (1997) antara lain: Pertama, Efektivitas Individu. Efektivitas yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi yang didasarkan pada pandangan dari segi individu. Kedua, Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya yakni dengan adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok sehingga membentuk suatu efektivitas kelompok. Ketiga, Efektivitas Organisasi. Efektivitas organisasi terdiri dari gabungan antara efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh yang sinergitas, organisasi dapat

---

<sup>12</sup><http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html> diakses pada 16 September 2014

menghasilkan suatu karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.<sup>13</sup> Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" yang mengatakan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dinilai sebagai suatu tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif dengan memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain."<sup>14</sup>

Menurut Stephen D. Krasner (1982), pengertian rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, yang bersifat eksplisit maupun implisit, dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.<sup>15</sup>

Menurut Oran R. Young, rezim merupakan suatu struktur sosial, dalam hal ini rezim merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik. Hal ini penting agar tidak salah mengartikannya sebagai sebuah fungsi, meskipun dalam berjalannya sebuah rezim sering memberikan kontribusi dalam pemenuhan

---

<sup>13</sup>[http://repository.uksw.edu/jspui/bitstream/123456789/2718/3/T1\\_362004018\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/jspui/bitstream/123456789/2718/3/T1_362004018_BAB%20II.pdf) diakses pada 3 November 2014

<sup>14</sup>Kumpulan Teori Efektivitas, Atsiw Wista tercantum pada <http://atsiwwista.blogspot.com/2013/09/teori-teori-efektivitas.html> diakses pada 16 September 2014

<sup>15</sup>Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987, " *Theories of International Regimes*", *International Organization*, Vol. 41, No. 3 (Summer, 1987), hal 493, diunduh dari scholar.harvard.edu

fungsi-fungsi tertentu. Seperti struktur lainnya, rezim jika diartikulasikan mungkin lebih atau kurang formal dan mungkin saja tidak disertai dengan pengaturan organisasi yang eksplisit.<sup>16</sup>

Sebenarnya, banyak faktor yang dapat memengaruhi efektivitas suatu rezim internasional. Menurut Oran R. Young dan Marc A. Levy (1999), sebuah rezim yang memiliki dampak perilaku yang kecil adalah rezim yang tidak efektif. Sehingga suatu rezim yang mempunyai pengaruh yang kecil terhadap negara-negara anggotanya dapat dikatakan bahwa rezim ini tidak efektif. Menurut Wahyudi Purnomo (2014), ada tidaknya negara hegemon dalam suatu rezim dapat menentukan efektif tidaknya rezim.

Stokke (2006) berpendapat bahwa terdapat dua pendekatan yakni ekonomi dan hukum internasional yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu rezim. Berdasar pada pendekatan ekonomi, efektivitas dapat ditentukan berdasarkan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Berdasar pada pendekatan hukum internasional, efektivitas dapat ditentukan melalui proses dan pelaksanaan aturan-aturan yang ada.

Menurut Stokke (2006), terdapat empat hal yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah rezim efektif, yaitu: Pertama, mengidentifikasi bukti empiris mengenai hal-hal yang menjadi sumber permasalahan. Kedua, membuktikan bahwa rezim secara kausal berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam proses pemecahan masalah. Ketiga, menimbang efek dari proses penyelesaian masalah yang rezim berikan terhadap faktor-faktor kausal lainnya. Keempat, mengukur efek yang muncul dari proses penyelesaian masalah tersebut menurut tolak ukur yang tepat.

Selain itu, Stokke (2006) juga mensyaratkan tiga hal yang dapat menentukan keberhasilan efektivitas dari suatu rezim, yaitu: *validity*, *determinacy*, dan *generality*. *Validity* merupakan bagaimana ketika terjadi sebuah fenomena dapat diambil intinya untuk mewujudkan

---

<sup>16</sup>Raditya Adi Nugraha. Tarik Menarik. FISIP UI 2010 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985-Tarik%20menarik-Tinjauan%20literatur.pdf> diakses pada 17 September 2014

apa yang menjadi tujuan rezim internasional itu sendiri. *Determinacy* merupakan bagaimana rezim tersebut dapat mengatur dan memberi batasan terhadap kesewenangan negara-negara. *Generality* merupakan bagaimana sebuah rezim dapat mencari hubungan dengan rezim yang sudah ada dan kemudian menekankan pada isu area yang dibahas.

Selain hal-hal yang dapat menentukan efektivitas suatu rezim, terdapat pula hal-hal yang menghambat suatu rezim. Yakni sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Stokke berikut ini:

Suatu rezim menjadi tidak efektif bila tidak memenuhi hal-hal yang telah disebutkan oleh Stokke (2006), yaitu: Pertama, tidak mengidentifikasi bukti empiris mengenai hal-hal yang menjadi sumber permasalahan. Kedua, tidak membuktikan bahwa rezim secara kausal berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam proses pemecahan masalah. Ketiga, tidak menimbang efek dari proses penyelesaian masalah yang rezim berikan terhadap faktor-faktor kausal lainnya. Keempat, tidak mengukur efek yang muncul dari proses penyelesaian masalah tersebut menurut tolak ukur yang tepat.<sup>17</sup>

Teori efektivitas rezim ini apabila dikaitkan dengan OKI dalam melaksanakan tujuannya yakni memperjuangkan hak-hak umat Muslim terutama di Myanmar, serta OKI sebagai suatu aturan norma sehingga OKI memiliki kekuatan untuk menjalankan tujuannya yang berbanding lurus dengan norma yang ada. OKI dalam menyelesaikan permasalahan di Myanmar dianggap kurang efektif karena sebagai rezim Internasional, sesuai dengan yang teori yang di sampaikan oleh Stokke (2012), bahwa rezim Internasional dikatakan tidak efektif apabila: Pertama, tidak mengidentifikasi bukti empiris mengenai hal-hal yang menjadi sumber permasalahan. Dalam hal ini, OKI pada dasarnya telah berupaya untuk mencari bukti empiris yang menjadi sumber permasalahan di Myanmar dengan membentuk tim pencari fakta, namun tim ini gagal

---

<sup>17</sup>Alfin Zulfikar Rizky. Efektivitas Rezim Internasional tercantum pada [http://alfinzulfikar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-96817-Rezim%20Internasional-EFEKTIVITAS%20REZIM%20INTERNASIONAL.html](http://alfinzulfikar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-96817-Rezim%20Internasional-EFEKTIVITAS%20REZIM%20INTERNASIONAL.html) diakses pada 17 September 2014

menunjukkan sumber permasalahan di Myanmar, yang menjadikan OKI sulit menyelesaikan masalah. Kedua, tidak membuktikan bahwa rezim secara kausal berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam proses pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun OKI telah berupaya menyelesaikan masalah, namun OKI tidak efektif dalam menyelesaikannya, sehingga tetap saja pelanggaran HAM di Myanmar terus terjadi dan tidak terselesaikan. Ketiga, tidak menimbang efek dari proses penyelesaian masalah yang rezim berikan terhadap faktor-faktor kausal lainnya. OKI memberikan banyak bantuan terhadap Myanmar namun OKI kurang menimbang efek dari bantuan tersebut yang ternyata tidak seluruhnya bantuan yang diberikan OKI ke warga Rohingya melalui pemerintah Myanmar ini dapat dialokasikan sesuai dengan harapan OKI. Keempat, tidak mengukur efek yang muncul dari proses penyelesaian masalah tersebut menurut tolak ukur yang tepat. OKI melakukan beberapa kesepakatan kepada pemerintah Myanmar namun, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan bahkan ada beberapa yang dilanggar. Misalnya kesepakatan pembuatan kantor OKI di Myanmar namun setelah kesepakatan itu terjadi, para Biksu di Myanmar menentang adanya kantor OKI. Sehingga OKI kurang tepat dalam proses penyelesaian masalah di Myanmar.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir diatas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa, alasan mengapa OKI kurang efektif kinerjanya dalam memperjuangkan hak-hak umat Muslim di Myanmar adalah:

1. OKI belum mampu untuk mengidentifikasi secara empiris apa yang menjadi permasalahan masyarakat Myanmar;

2. OKI tidak dapat membuktikan bahwa OKI secara kausal berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam proses pemecahan masalah yang terjadi pada warga Rohingya di Myanmar;
3. OKI tidak menimbang efek dari proses penyelesaian masalah yang terjadi di Myanmar serta tidak memperhatikan sebab-sebab masalah lainnya;
4. OKI tidak mengukur efek yang muncul dari proses penyelesaian masalah Rohingya menurut tolak ukur yang tepat oleh sebab itu OKI tidak dapat menjalankan fungsi organisasi internasionalnya sebagaimana mestinya.

#### **E. Tujuan Penulisan**

1. Mengkaji kembali keefektifan OKI dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung umat muslim
2. Mengetahui kinerja OKI selama menyelesaikan permasalahan di Myanmar
3. Mengetahui penyebab ketidakefektifan kinerja OKI
4. Memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjaahan jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### **F. Jangkauan Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membatasi periodisasi pelanggaran hak-hak umat Muslim di Myanmar yang terjadi antara tahun 2010 saat permasalahan pelanggaran HAM di Myanmar mulai mencuat, hingga tahun 2013 ketika banyak ketidakadilan masih menimpa warga Rohingya

di Arakan, ribuan jiwa melayang. Serta adanya fatwa dari seorang Biksu tentang membersihkan umat Muslim di Myanmar. Namun untuk melatarbelakangi ataupun memperjelas bahasan tidak menutup kemungkinan penulis menambah bahan dari sebelum maupun sesudah periode tersebut.

### **G. Metode Penulisan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan ranah jangkauan yang luas. Data dihimpun dan disajikan dalam bentuk verbal dan menekankan pada konsep kontekstual. Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan atau *Library Research*. Dengan studi kepustakaan ini penulis mengharapkan nantinya dapat menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, media elektronik serta situs – situs internet dan sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang OKI bagaimana sejarah berdirinya OKI, visi misi, keanggotaan OKI, struktur organisasi dimiliki oleh OKI, serta peran OKI di dunia.

BAB III Membahas tentang bagaimana situasi dan kondisi umat Muslim di Myanmar, apa yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran HAM terhadap umat Muslim, serta membahas tentang bagaimana kinerja OKI dalam menyelesaikan persoalan umat Islam di Myanmar

BAB IV Menjelaskan mengapa OKI tidak efektif dalam memperjuangkan hak-hak umat Muslim di Myanmar.

BAB V Kesimpulan.